

**KAPABILITAS BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA
NASIONAL DALAM PROGRAM KELUARGA BERENCANA
DITINJAU DARI COLLABORATIVE GOVERNANCE**

***CAPABILITIES OF BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA
NASIONAL IN THE KELUARGA BERENCANA PROGRAM REVIEW FROM
COLLABORATIVE GOVERNANCE***

**Anggun Shinta
Bella¹**

Universitas Panca
Marga, Indonesia¹
email:
anggunsintabella@gmail.com

Siti Marwiyah²

Universitas Panca
Marga, Indonesia²
email:
marwiyah@upm.ac.id

Andhi Nur

Rahmadi³

Universitas Panca
Marga, Indonesia³
email:
andhi.iansyah@upm.ac.id

JGPI

p-ISSN: 2774-907X

e-ISSN: 2775-0140

Vol. 2, No. 1, pp. 1-8

April 2022



Unit Publikasi Ilmiah
Intelektual Madani
Indonesia

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kapabilitas Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dalam Pengendalian Kuantitas Penduduk Di Desa Krucil, Kecamatan Krucil, Kabupaten Probolinggo. Fokus penelitian ini adalah langkah yang dilakukan oleh BKKBN dengan target pengendalian kelahiran dan penurunan angka kematian. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Data-data yang disajikan menggunakan data primer dan sekunder melalui observasi, dokumentasi, studi pustaka, dan wawancara. Hasil penelitian dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, BKKBN dalam pengendalian kuantitas penduduk sudah melakukan tugasnya secara maksimal, hal ini dapat dilihat dari penguatan akses pelayanan KB (Keluarga Berencana) dengan memberikan sosialisasi, pelatihan peningkatan kompetensi Manajerial dan Sosiokultura bagi tenaga Petugas Keluarga Berencana (PKB) dan Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB). Kemudian BKKBN juga telah memberikan pelatihan program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) kepada *civil society* seperti tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh penting yang ada diwilayah Kecamatan Krucil. Dapat disimpulkan bahwa keberhasilan BKKBN tidak terlepas dari peran 3 elemen, yaitu elemen pemerintahan (*government*), elemen kelompok *professional front-line (private sector)*, elemen masyarakat (*society*) selanjutnya disebut *collaborative governance*.

Kata Kunci : Kapabilitas, BKKBN, KB, *Collaborative Governance*.

Abstract: This study aims to determine how the capability of the National Population and Family Planning Agency (BKKBN) in Control of Population Quantity in Krucil Village, Krucil District, Probolinggo Regency. The focus of this research is the steps taken by the BKKBN with the target of birth control and reducing mortality. This research uses descriptive qualitative method. The data presented using primary and secondary data through observation, documentation, literature study, and interviews. The results of the study were analyzed using qualitative analysis. The results showed that the BKKBN in controlling population quantity had carried out its duties optimally, this can be seen from the strengthening of access to family planning services (Family Planning) by providing socialization, training to increase Managerial and Sociocultural competencies for Family Planning Officers (PKB) and Field Extension Officers. Family Planning (PLKB). Then the BKKBN has also provided training on the Family Planning Population and Family Development (KKBPK) program to civil society such as religious leaders, community leaders, and important figures in the Krucil District area. It can be concluded that the success of BKKBN cannot be separated from

the role of 3 elements, namely elements of government (government), elements of front-line professional groups (private sector), elements of society (society) hereinafter referred to as collaborative governance.

Keywords: Capabilities, BKKBN, KB, Collaborative Governance.

PENDAHULUAN

Masalah yang masih terjadi di Indonesia yaitu berkaitan dengan kesenjangan ekonomi atau kemiskinan. Salah satu faktor dari kemiskinan yaitu kepadatan penduduk yang akan memberikan dampak bagi perekonomian keluarga serta mengganggu stabilitas negara. Negara dituntut untuk selalu memperhatikan kesejahteraan rakyat. Semakin banyak penduduknya, maka akan semakin besar pula tanggungjawabnya. Pertumbuhan penduduk harus diimbangi dengan upaya pemerintah untuk pengendalian dengan menekan angka pertumbuhan yang dimaksud. Jika pertumbuhan penduduk tidak diimbangi dengan pengendalian, maka akan banyak terjadi masalah-masalah serius yang akan mempengaruhi kesejahteraan masyarakat seperti mutu sumber daya manusia yang berkualitas, peningkatan jumlah pencari kerja dengan lapangan kerja yang terbatas, dan besaran jumlah konsumsi pada setiap keluarga.

Indonesia merupakan salah satu negara dengan penduduk terpadat dan menduduki posisi ke-empat di dunia setelah Tiongkok, India, dan Amerika Serikat. Berdasarkan hasil Sensus Penduduk tahun 2020 mencatat bahwa jumlah penduduk di Indonesia sebanyak 270,20 juta jiwa. Ini menunjukkan bahwa jumlah penduduk hasil perhitungan dari Sensus Penduduk tahun 2020 bertambah sebanyak 32,56 juta jiwa jika dibandingkan dengan hasil perhitungan Sensus Penduduk tahun 2010. Dengan luas daratan Indonesia sebesar 1,9 juta km², maka kepadatan penduduk di Indonesia sebanyak 141 jiwa per km². Dapat disimpulkan bahwa, laju pertumbuhan penduduk per tahun selama tahun 2010-2020 yaitu dalam kurun waktu 10 tahun, rata-rata sebesar 1,25 persen, dapat diartikan bahwa hasilnya melambat dibandingkan periode tahun 2000-2010 dalam kurun waktu 10 tahun juga sebesar 1,49 persen.

Kabupaten Probolinggo merupakan salah satu Kabupaten yang berada di wilayah Provinsi Jawa Timur. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Probolinggo, tercatat dari Sensus Penduduk tahun 2020 bahwa populasi dari 24 Kecamatan sebanyak 1,152,537 juta jiwa. Jika dibandingkan dengan perhitungan dari Sensus Penduduk tahun 2010 dengan jumlah penduduk sebanyak 1,096,244 juta jiwa, maka dalam kurun waktu 10 tahun penduduk di Kabupaten Probolinggo bertambah

sebanyak 56,293 ribu jiwa. Begitu pula di Desa Krucil, Kecamatan Krucil, Kabupaten Probolinggo, jumlah penduduk di Desa Krucil pada tahun 2020 sebanyak 5,533 ribu jiwa merupakan jumlah penduduk yang sangat banyak. Setiap tahun selalu meningkat dan dapat dikatakan sangat tinggi. Dengan peningkatan penduduk yang sangat tinggi, maka diperlukan upaya pemerintah dalam pemerataan penduduk agar menghasilkan penduduk yang berkualitas. Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Probolinggo bahwa Kecamatan Krucil memiliki populasi penduduk sebanyak 56,790 ribu jiwa. Selanjutnya, untuk Desa Krucil memiliki luas wilayah sebesar 1,320,82 Ha dan terbagi menjadi 6 dusun, 3 RW dan 19 RT dengan jumlah penduduk 5,533 ribu jiwa.

Keluarga berkualitas adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah dan bercirikan sejahtera, sehat, maju, mandiri, memiliki jumlah anak yang ideal, berwawasan ke depan, bertanggung jawab, dan harmonis. Dengan semakin banyaknya kuantitas penduduk maka dilakukan pengendalian melalui program Keluarga Berencana (KB). Pengendalian kuantitas penduduk dilakukan dengan tujuan untuk mewujudkan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan antara jumlah penduduk dengan lingkungan hidup baik yang berupa daya dukung alam maupun daya tampung lingkungan serta kondisi perkembangan sosial ekonomi dan budaya.

Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga menyatakan bahwa, pengendalian kuantitas penduduk sebagaimana dimaksud dilakukan sesuai dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan melalui pengendalian kelahiran, penurunan angka kematian, dan pengarahan mobilitas penduduk. Pada peraturan tingkat daerah berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga menyatakan bahwa Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan pengendalian penduduk dan menyelenggarakan Keluarga Berencana di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota. Sedangkan di Kabupaten Probolinggo mengacu pada Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Keluarga Berencana Di Kabupaten Probolinggo yang menyatakan bahwa, untuk meningkatkan pelayanan Keluarga Berencana di daerah perlu ditindaklanjuti dengan perjanjian kerjasama antara Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Probolinggo dengan RSUD dan Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo. Salah satu lembaga pemerintah yang menangani masalah kependudukan ditingkat Kecamatan

adalah Petugas Lapangan Keluarga Berencana. Petugas Lapangan Keluarga Berencana selanjutnya disingkat PLKB adalah Pegawai Negeri Sipil atau non Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh pejabat yang berwenang yang mempunyai tugas, tanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan, pelayanan, evaluasi dan pengembangan KB.

METODE

Pemilihan wilayah atau daerah populasi penelitian dalam penelitian ini menggunakan *Purposive Sampling*, teknik sampling ini digunakan pada penelitian-penelitian yang lebih mengutamakan tujuan penelitian daripada sifat populasi dalam menentukan sampel (Bungin, 2010). Penelitian ini dilaksanakan di Desa Krucil, Kecamatan Krucil, Kabupaten Probolinggo. Alasan pemilihan Desa Krucil Kecamatan Krucil dikarenakan Desa Krucil merupakan salah satu desa yang penduduknya tidak terlalu melonjak tinggi penduduknya mengingat diseluruh desa akibat covid-19 terjadi *baby boom*. Sudah banyak masyarakat di Desa Krucil yang sadar akan pentingnya pemakaian alat kontrasepsi atau ikut KB. Oleh karena alasan itu peneliti memilih Desa Krucil untuk dijadikan subjek penelitian.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pengamatan (*observasi*) yaitu pengumpulan data untuk menjawab masalah penelitian dengan cara melakukan pengamatan yakni mengamati gejala yang diteliti secara langsung. Selain itu juga menggunakan metode wawancara (*interview*), yaitu merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antara peneliti dengan sumber data (informan). Pihak terkait yang akan di wawancarai oleh peneliti untuk mendapat informasi data yang akurat yaitu narasumber dari jajaran Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) melalui Balai Penyuluh Keluarga Berencana Kecamatan Krucil, anggota PKK Kecamatan Krucil, anggota IBI di lingkungan Kecamatan Krucil, dan masyarakat Desa Krucil, serta analisis dokumen yang berhubungan dengan permasalahan pengendalian kuantitas penduduk. Hasil penelitian yang diperoleh kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif.

HASIL DAN DISKUSI

Keterampilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional dalam Revitalisasi Program Keluarga Berencana

Program Keluarga Berencana merupakan program pemerintah yang dirancang secara terintegrasi, sinergis, terpadu dan terukur guna mewujudkan kesejahteraan

keluarga dan masyarakat. Program KB tidak hanya sebatas mengejar indikator capaian kuantitatif KB seperti capaian Peserta KB Baru (PB), Peserta KB Aktif (PA) atau Peserta KB Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP), namun tentu juga terkait dengan capaian indikator kualitatif, yakni keluarga berkualitas, penurunan angka kelahiran dan kematian, berketahanan dan dan kesejahteraan setiap keluarga sebagai tujuan akhir dari pembangunan keluarga. Untuk itu diperlukan desain kebijakan dan implementasi program KB secara tepat.

Revitalisasi program Keluarga Berencana yang dilakukan oleh BKKBN di Desa Krucil, Kecamatan Krucil yaitu melalui sarasehan setiap tahunnya. Sarasehan ini dilakukan di setiap wilayah kecamatan termasuk kecamatan Krucil. Menurut ketua Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) Kecamatan Krucil, tujuan diadakan kegiatan sarasehan ini adalah kegiatan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kader KB dan sebagai momentum kesiapan masyarakat akan peduli KB untuk mensukseskan program KB dimasa yang akan datang. Peserta Revitalisasi Program Keluarga Berencana melalui sarasehan sejumlah 50 orang yaitu 42 perwakilan kader dari setiap Desa di Kecamatan Krucil, Camat Krucil, dan 7 petugas Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) di Kecamatan Krucil.

Kegiatan Revitalisasi Program Keluarga Berencana melalui sarasehan dikemas dalam bentuk kegiatan pembinaan yang komunikatif informatif, edukatif, bakti sosial pelayanan KB dan kesehatan. Kegiatan ini dilaksanakan di balai Penyuluh KB Kecamatan Krucil dengan rincian kegiatan tentang sarasehan dan pembinaan kepada kader Keluarga Berencana yang terdiri dari kader Posyandu, Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Lansia, Bina Keluarga Remaja. Sarasehan ini adalah salah satu program dari BKKBN yang menjadi target utama keberhasilan program KB dimasyarakat melalui petugas KB.

Pengetahuan di Bidang Pengendalian Penduduk dan Penyelenggaraan Keluarga Berencana

Diera milenial saat ini sepertinya program Keluarga Berencana sudah mulai hilang dari kehidupan bermasyarakat, hal ini mulai ditunjukkan dengan mulai banyaknya keluarga yang memiliki anak lebih dari dua, artinya keluarga tersebut sudah tidak mendukung program tersebut. Permasalahan ini perlu menjadi perhatian kembali oleh pemerintah dan masyarakat Indonesia, karena apabila tidak diperhatikan, masalah populasi penduduk akan tidak terkontrol sehingga bisa juga menyebabkan permasalahan

ekonomi, sosial dan merambah ke kriminalitas, yang diakibatkan oleh jumlah penduduk yang meningkat tidak seimbang dengan kesejahteraan masyarakat. Oleh sebab itu pemerintah dan masyarakat itu sendiri, perlu kembali menggiatkan perhatian masyarakat pada program Keluarga Berencana tersebut.

Namun berbeda dengan masyarakat Desa Krucil, Kecamatan Krucil, Kabupaten Probolinggo. Berdasarkan hasil penelitian, terdapat sekitar 78% pasangan suami istri yang menggunakan alat KB. Sesuai data tersebut dapat disimpulkan bahwa masih ada masyarakat yang tidak menggunakan KB meski mayoritas masyarakat sudah menggunakannya. Pengetahuan masyarakat akan Keluarga Berencana sudah baik, karena mereka mengetahui apa maksud dari program Keluarga Berencana tersebut dan resiko apa yang akan terjadi jika tidak mengikuti program KB. Pemahaman masyarakat tentang program Keluarga Berencana sudah cukup baik, namun masih ada juga masyarakat yang memiliki pemikiran sendiri dan tidak mengikuti program Keluarga Berencana tersebut, dikarenakan mereka berpikir bahwa mereka mampu untuk memiliki anak lebih dari 2, baik secara ekonomi maupun pekerjaan mereka.

Masyarakat sudah banyak mengetahui tentang manfaat positif dari program Keluarga Berencana. Namun karena banyaknya informasi yang masuk dalam keseharian mereka informasi mengenai KB tersebut kurang diminati karena didominasi dengan berbagai informasi mengenai hiburan melalui adanya perkembangan teknologi informasi, sementara untuk informasi penyuluhan di Balai Desa sudah mulai di lupakan, informasi Keluarga Berencana hanya ada pada saat adanya jadwal Posyandu dari Puskesmas kecamatan yang turun ke desa-desa. Masyarakat sudah mengetahui dengan baik dampak negatif bila tidak mengikuti program Keluarga Berencana tersebut, dari hasil wawancara banyak yang memberikan pendapat bahwa ikut program KB tergantung dari pasangan atau keluarga itu sendiri resikonya, karena bila tidak mengikuti otomatis harus sanggup menafkahi anak yang lebih dari dua, secara ekonomi masyarakat sekarang memiliki semangat untuk meningkatkan kesejahteraan hidup keluarga dengan berbagai macam pekerjaan yang mereka tekuni.

Kemampuan Penyelenggaraan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi di Bidang Pengendalian Penduduk dan Penyelenggaraan Keluarga Berencana

Salah satu penyelenggaraan komunikasi, informasi, dan edukasi dibidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan Keluarga Berencana oleh BKKBN yaitu

dengan mengadakan sosialisasi atau penyuluhan kepada masyarakat Desa Krucil. Penyuluhan yang diberikan sebagian besar merupakan materi tentang Keluarga Berencana dan jenis-jenisnya. Kegiatan penyuluhan Keluarga Berencana dan jenis-jenis ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat umumnya pada ibu-ibu rumah tangga yang berusia reproduktif khususnya untuk dapat menyadari pentingnya berperilaku hidup bersih dan sehat. Jenis penyuluhan yang dilakukan cukup mudah untuk dilakukan oleh masyarakat dan mudah dipahami oleh ibu-ibu rumah tangga. Diharapkan dengan adanya penyuluhan tentang KB dan jenis-jenis kontrasepsi dapat meningkatkan pengetahuan ibu-ibu tentang pentingnya KB dan penggunaan alat kontrasepsi yang aman dan berkualitas.

Dengan adanya peningkatan pengetahuan ini diharapkan dapat muncul sikap kesadaran dan niat untuk menggunakan alat kontrasepsi yang aman. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya pertanyaan yang dilontarkan oleh ibu-ibu peserta terkait tentang program KB, keuntungan dan kerugian KB, dan efek samping dari beberapa jenis KB yang mereka gunakan. Dampak dari penyuluhan yang dilakukan adalah adanya kesadaran masyarakat Desa Krucil untuk menggunakan alat kontrasepsi, peningkatan pengetahuan terkait KB dan kontrasepsi, peningkatan akseptor KB di daerah setempat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa BKKBN melakukan revitalisasi program KB dengan menghadirkan kader di Desa Krucil, Kecamatan Krucil dengan tujuan peningkatan pengetahuan dan keterampilan seluruh kader melalui acara sarasehan yang diikuti beberapa elemen penting dari Pemerintah Desa. Pengetahuan dan pemahaman masyarakat Desa Krucil tentang pentingnya program Keluarga Berencana cukup baik, dikarenakan informasi mengenai program KB sudah menjadi bahan informasi dari BKKBN walaupun masih ada yang belum mengikutinya. Selain itu, Penyelenggaraan komunikasi, informasi, dan edukasi di bidang Pengendalian Penduduk dan penyelenggaraan Keluarga Berencana oleh BKKBN yaitu dengan mengadakan sosialisasi atau penyuluhan kepada masyarakat Desa Krucil dengan hasil adanya kesadaran masyarakat Desa Krucil untuk menggunakan alat kontrasepsi, Peningkatan pengetahuan terkait KB dan kontrasepsi, Peningkatan Akseptor KB di daerah setempat.

REFERENSI

- Pragita, R., Boham, A., & Rembang, M. (2021.). Persepsi Masyarakat Tentang Pentingnya Keluarga Berencana di Desa Doloduo Kecamatan Dumoga Barat. *Jurnal Acta Diurna Komunikasi*, 3(1), 1-11.
- Bhakti, I. S. G., & Lubis, R. K. (2021). Efektivitas Sosialisasi Program Keluarga Berencana Di Kampung Keluarga Berencana. *Jurnal Komunikasi dan Kajian Media*, 5(1), 39-52.
- Moenir. (2008). *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2010, *Tentang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah*.
- Jusliati, Abd.Kadir Adys, Haq, Nasrul. (2018). Pelaksanaan Program Keluarga Berencana (KB) di Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang. *Kolaborasi, Jurnal Administrasi Publik*, 4(1), 16-33.
- Linda Sari, N. (2018). Kinerja Penyuluh Program Keluarga Berencana Di Kecamatan Cendrana Kabupaten Maros. *Skripsi*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Aisyah, Nur., Purwanda, Eka. (2019). Analisis Kapabilitas Karyawan Bagian PPIC Di PT.Idola Selaras Abadi. *Prosiding, FRIMA, Festival Riset Ilmiah Manajemen dan Akuntansi*, 855-863.
- Rahmi Putri, A. (2021). Proses Collaborative Governance dalam Implementasi Program Konservasi Penyu di Desa Maligi Kecamatan Sasak Ranah Pasisie Kabupaten Pasaman Barat. *Skripsi*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara.
- Mayasari Br Damanik, K. (2020). Pengaruh Efektivitas Program Keluarga Berencana Dan Pertumbuhan Jumlah Penduduk Terhadap Tingkat Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Di Kota Medan. *Skripsi*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
- Luqito Chusuma Arrozaq, D. (2020). Collaborative Governance (Studi Tentang Kolaborasi Antar Stakeholders Dalam Pengembangan Kawasan Minapolitan di Kabupaten Sidoarjo). *Tesis*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga.
- Kusdi. (2009). *Teori Organisasi dan Administrasi*. Jakarta : Salemba Humanika.
- Kumara Dewi, L. (2020). Fungsi Administrasi Dalam Upaya Meningkatkan Efisiensi Pelayanan Pada Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Cabang Bandar Lampung. *Jurnal Sosial dan Humanis Sains*, 5(1), 34-46.